

Kualitas demokrasi di Indonesia dalam era digital: Peran teknologi dalam meningkatkan atau melemahkan demokrasi

Lia Gina

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250503110092@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Demokrasi digital; teknologi informasi; partisipasi politik; literasi digital; disinformasi.

Keywords:

Digital democracy; information technology; political participation; digital literacy; disinformation.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak yang besar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran teknologi digital dalam memperkuat sekaligus berpotensi melemahkan demokrasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, serta penelitian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperluas akses informasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun demikian, teknologi digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, polarisasi sosial, serta kemungkinan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan lingkungan digital yang sehat. Dengan demikian, teknologi digital dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung demokrasi yang lebih inklusif, kritis, dan berkelanjutan di Indonesia.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has had a significant impact on the quality of democracy in Indonesia. This study aims to examine the role of digital technology in both strengthening and potentially weakening democracy. The research applies a qualitative descriptive approach through a literature review, utilizing secondary data from academic journals, books, and previous studies. The findings reveal that digital technology can enhance political participation, expand access to information, and promote transparency and government accountability. However, it also poses several challenges, including the spread of hoaxes, misinformation, social polarization, and the potential manipulation of public opinion. Therefore, improving digital literacy, strengthening regulations, and fostering collaboration between the government and society are essential to establish a healthy digital environment. In conclusion, digital technology can be effectively utilized to support a more inclusive, critical, and sustainable democracy in Indonesia.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara hidup dan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kemajuan internet, media sosial, dan teknologi informasi telah menciptakan



ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat terlibat lebih luas dalam proses politik. Sekarang akses informasi semakin cepat, praktis, dan tidak terbatas, sehingga memicu meningkatnya partisipasi warga negara dalam menyampaikan harapan, mengawasi kebijakan pemerintah, serta membentuk opini masyarakat. Dalam hal ini, teknologi digital memainkan peran penting dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama demokrasi.

Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan yang cukup kompleks terhadap kualitas demokrasi. Penyebaran berita palsu, informasi yang tidak benar, dan meningkatnya perpecahan di ruang digital menjadi ancaman berbahaya yang bisa mengubah cara masyarakat memahami politik secara nyata. Selain itu, kemudahan dalam menyebarkan informasi secara luas melalui media sosial juga memberi kesempatan bagi terjadinya manipulasi opini publik yang bisa merusak integritas demokrasi. Ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukan hanya bisa memperkuat demokrasi, tapi juga bisa berdampak negatif dan melemahkan demokrasi tersebut (Madamang, 2025,).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih dalam mengenai bagaimana teknologi digital berdampak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Mengerti dengan baik peluang dan tantangan yang muncul di masa digital diharapkan bisa menjadi dasar dalam membuat strategi yang tepat untuk menjaga dan memperkuat demokrasi. Dengan demikian, teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana dalam membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif, kritis, dan berkelanjutan di Indonesia.

Metode dan Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan mengenai pentingnya pemahaman terhadap peran teknologi digital dalam memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital secara bijak dalam kehidupan politik serta turut berpartisipasi aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, kesadaran terhadap berbagai dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi sosial, juga perlu ditingkatkan agar tidak mengganggu stabilitas demokrasi. Dengan demikian, teknologi digital diharapkan tidak hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana dalam memperkuat sistem demokrasi yang lebih inklusif, kritis, dan berkelanjutan.

Teknik yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah melalui telaah pustaka dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik teknologi digital dan kualitas demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran teknologi digital dalam memperkuat maupun melemahkan demokrasi. Melalui metode ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas dan mendalam terkait dinamika demokrasi di era digital.

Pembahasan

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Internet, media sosial, serta berbagai platform digital kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi ruang publik baru yang memengaruhi dinamika politik, partisipasi masyarakat, dan distribusi informasi.

Di satu sisi, teknologi digital berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Kemudahan akses informasi memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan politik secara cepat dan luas. Hal ini memperkuat posisi warga negara sebagai subjek aktif dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik juga menjadi lebih terbuka karena masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, maupun dukungan melalui media digital (Elizamiharti & Nelfira, 2024). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pemerintah semakin meningkat karena masyarakat dapat mengawasi kebijakan dan tindakan pejabat publik secara langsung melalui platform digital.

Lebih lanjut, teknologi digital turut mendorong terciptanya ruang diskusi publik yang lebih terbuka. Diskursus politik tidak lagi terbatas pada forum konvensional, tetapi berkembang dalam bentuk diskusi daring, petisi online, hingga kampanye digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi mampu memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat prinsip demokrasi yang berbasis pada keterlibatan publik.

Namun demikian, di sisi lain teknologi digital juga berpotensi melemahkan kualitas demokrasi. Salah satu permasalahan utama adalah penyebaran disinformasi dan berita hoaks yang sangat cepat di media sosial. Informasi yang tidak akurat dapat memengaruhi opini publik serta keputusan politik Masyarakat (Efendi et al., 2025). Fenomena ini diperkuat oleh adanya filter bubble dan echo chamber, yang menyebabkan individu hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga meningkatkan polarisasi dalam masyarakat.

Selain itu, manipulasi opini publik melalui algoritma media sosial dan praktik kampanye digital yang tidak etis menjadi ancaman serius. Teknologi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi persepsi publik maupun hasil pemilu secara tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai, teknologi justru dapat merusak prinsip keadilan dalam demokrasi.

Tantangan lainnya berkaitan dengan perlindungan data dan privasi. Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks politik dapat mengancam kebebasan individu serta integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat serta sistem pengawasan yang efektif terhadap penggunaan teknologi digital.

Dalam konteks Indonesia, kualitas demokrasi di era digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Literasi digital menjadi faktor penting agar masyarakat mampu menyaring informasi, memahami cara kerja media digital, serta berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan politik (Rohmatin et al., 2024). Selain itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan demokratis (Madamang & Hadmar, 2025).

Dengan demikian, teknologi digital memiliki dua sisi dalam demokrasi, yaitu sebagai sarana yang dapat memperkuat sekaligus melemahkan kualitas demokrasi. Dampak yang dihasilkan sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan, diatur, dan direspons oleh masyarakat.

Perkembangan Teknologi Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet dan media sosial secara signifikan. Data menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah melampaui 70% dari total populasi (Efendi et al., 2025). Kondisi tersebut menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Peningkatan penggunaan internet dan media sosial telah membawa perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi serta memperoleh informasi. Platform digital kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana utama dalam menyebarkan informasi politik secara cepat dan luas. Informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui media konvensional kini dapat diperoleh dengan mudah dan instan melalui perangkat digital.

Selain itu, platform digital memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan politik. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik terhadap kebijakan, serta berpartisipasi dalam diskusi publik secara langsung melalui media sosial (Elizamiharti & Nelfira, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah mendorong perubahan ruang publik dari bentuk konvensional menjadi ruang digital yang lebih terbuka dan partisipatif.

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Demokrasi

Teknologi digital memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya internet dan media sosial, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam berbagai aktivitas politik, seperti menyampaikan pendapat dan mengikuti kampanye digital (Elizamiharti & Nelfira, 2024).

Selain itu, teknologi digital juga memperluas ruang kebebasan berekspresi. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan pandangan dan opini politik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini memperkuat nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat (Rohmatin et al., 2024).

Teknologi juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi. Pemerintah dapat menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat, sementara masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan secara langsung. Kemudahan akses terhadap informasi ini turut meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Di samping itu, teknologi digital juga mendukung munculnya berbagai gerakan sosial dan kampanye digital yang semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi (Madamang & Hadmar, 2025).

Peran Teknologi dalam Melemahkan Demokrasi

Selain memberikan dampak positif, teknologi digital juga memiliki potensi untuk melemahkan demokrasi. Salah satu permasalahan utama adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik (Efendi et al., 2025). Informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berujung pada pengambilan keputusan politik yang tidak tepat.

Selain itu, fenomena polarisasi masyarakat yang dipicu oleh echo chamber dan filter bubble menjadi tantangan serius. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya, sehingga memperkuat perbedaan dalam masyarakat.

Teknologi digital juga sering dimanfaatkan dalam praktik politik identitas yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selain itu, manipulasi opini publik melalui buzzer dan propaganda digital menjadi ancaman nyata terhadap demokrasi yang sehat (Madamang & Hadmar, 2025).

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan politik, seperti dalam praktik microtargeting, yang dapat mengancam kebebasan individu serta integritas proses demokrasi.

Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia

Dalam menghadapi era digital, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mampu menyaring informasi secara kritis sehingga mudah terpengaruh oleh hoaks (Rohmatin et al., 2024). Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi atau digital divide masih menjadi permasalahan di Indonesia. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, sehingga memengaruhi tingkat partisipasi dalam ruang digital.

Tantangan lainnya adalah lemahnya regulasi serta penegakan hukum terkait penggunaan teknologi digital. Kurangnya pengawasan dapat memperburuk penyebaran konten negatif yang berdampak pada kualitas demokrasi. Aspek etika dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam konteks politik, juga menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran demokratis yang menekankan nilai toleransi dan keberagaman guna menciptakan masyarakat yang inklusif dan demokratis (Fitriyah, 2012).

Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan mendukung praktik demokrasi yang lebih baik (Madamang & Hadmar, 2025).

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, keberadaan teknologi digital mampu mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat, memperluas akses terhadap informasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Internet dan

media sosial telah menghadirkan ruang publik yang lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Namun, di sisi lain, teknologi digital juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, polarisasi sosial, serta potensi manipulasi opini publik yang dapat melemahkan demokrasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital sangat ditentukan oleh cara masyarakat dan pemerintah dalam mengelolanya secara bijaksana.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat demokrasi di era digital. Pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital, terutama dalam menanggulangi penyebaran informasi yang menyesatkan serta melindungi data pribadi masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan juga perlu diperkuat guna menciptakan lingkungan digital yang sehat. Dengan demikian, teknologi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Teks utama dalam font 12, spasi tunggal.

Daftar Pustaka

- Efendi, F., Safira, B. W., & Agustina, D. H. (2025). Demokrasi Di Era Digital : Peluang Dan Ancaman. *SALUT: Journal of Social and Education*, 2(1), 106–111. <https://ripublis.com/index.php/salut/article/view/141>
- Elizamiharti, & Nelfira. (2024). Demokrasi Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61–72. Doi: <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandua Hidup Berbangsa*. Malang: UIN Malang Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Firdaus, F. R. (2026). Demokrasi Digital dan Proses Legislasi : Pengaruh Platform Media Sosial dan Petisi Online dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 23(1), 111–130. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111>
- Fitriyah, N. L. (2012). MEMBANGUN PEMBELAJARAN DEMOKRATIS BERWAWASAN MULTIKULTURAL. *Madrasah*, 5(1), 55–66. <https://repository.uin-malang.ac.id/629/>
- Hasba, I. B. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Malang: UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/26058/>
- Madamang, I., & Hadmar, A. M. (2025). Dampak Teknologi Digital dan Media Sosial terhadap Demokrasi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 3069–3074. Doi: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1600>
- Prabowo, N. (2023). Urgensi Pendidikan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 865–871. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.311>
- Rohmatin, Z., Taufiq, A. M., Nurmadina, N. A., Rizqullah, R., & Hasibuan, H. A. (2024). Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital. *SOSIAL*, 2(4), 38–49. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.454>